

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Film didefinisikan sebagai serangkaian gambar diam yang saat ditampilkan di layar mampu menciptakan ilusi gerak (Felani, 2020). Dari perspektif teknis, kemunculan gambar bergerak tersebut didasarkan pada prinsip kerja yang serupa dengan proses penciptaan gambar dalam fotografi. Namun, jika fotografi hanya menghasilkan satu gambar tunggal yang statis, maka film merupakan himpunan dari banyak gambar diam yang berasal dari teknik fotografi. Gambar-gambar ini, sebelum diproyeksikan, tidak menunjukkan pergerakan apa pun. Akan tetapi, ketika seluruh gambar tersebut ditayangkan secara berurutan dan berkelanjutan melalui perangkat proyektor, munculah ilusi optik yang kita kenali sebagai gambar bergerak (Ariansah, 2008).

Film merupakan bentuk media komunikasi yang telah hadir sejak lama dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Sejak kemunculan awalnya, film telah menunjukkan kemampuannya sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam memberikan informasi ke jangkauan masyarakat luas. Sebagaimana bentuk media massa lainnya, film menyampaikan pesan yang bersifat umum dan ditujukan kepada khalayak luas. Media massa memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial, karena keduanya saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, perilaku dan tindakan individu dapat dipengaruhi oleh media, terutama ketika pesan yang disampaikan mampu menembus ranah personalitas seseorang (Rivers et al., 2012).

Sebagai sarana kontrol sosial, media massa memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan maupun mempertahankan kondisi sosial yang stagnan. Mengingat peran penting komunikasi dalam ranah sosial, politik, budaya, dan pendidikan, proses komunikasi idealnya dilakukan secara persuasif, bukan

sekadar menyampaikan informasi, agar pesan mampu memengaruhi keyakinan, sikap, atau tindakan individu (Effendy, 2009). Di antara berbagai bentuk media massa, film dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif karena memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan media lain. Hal ini disebabkan film tidak hanya mengandalkan gambar dan dialog, tetapi juga memanfaatkan simbol-simbol tertentu yang memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

Pemahaman mengenai bagaimana media bekerja dalam memengaruhi publik dapat ditelusuri melalui konsep propaganda, yang pada mulanya tidak terkait politik, melainkan berakar dari tradisi Gereja Katolik melalui lembaga *Sacra Congregatio Christiano Nomini Propagando* yang didirikan oleh Paus Gregorius XV pada tahun 1622 yang bertugas menyebarkan ajaran agama. Akan tetapi, perubahan kondisi historis terutama selama Perang Dunia I dan II membuat istilah ini mengalami pergeseran makna hingga akhirnya identik dengan praktik komunikasi yang bersifat negatif dan manipulatif. Dalam penggunaan modern, propaganda dipahami sebagai bentuk penyampaian informasi, baik akurat maupun rekayasa, yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu secara sepihak. Karena sifatnya yang tidak memberikan pandangan menyeluruh, propaganda sering digunakan untuk memengaruhi opini publik, mengarahkan sikap, atau membentuk persepsi melalui pesan yang disusun secara selektif dan strategis (Irawanto, 2004).

Dalam perkembangan ilmu komunikasi di dunia Barat. Teori stimulus-respons pertama kali dirumuskan oleh Harold D. Lasswell untuk menjelaskan bagaimana media massa memengaruhi audiens pasif. Lasswell mencatat empat tujuan utama propaganda politik yakni menanamkan kebencian terhadap musuh, menjaga persahabatan sekutu, mempertahankan hubungan baik dengan pihak netral, dan menghancurkan moral musuh. Di sisi lain, tokoh komunikasi seperti Ralph D. Casey memberi perspektif yang lebih positif dengan melihat propaganda sebagai upaya sadar dari lembaga komunikasi untuk menyebarkan fakta demi objektivitas dan kejujuran (Malhan, 2020).

Dengan demikian, propaganda tidak selalu berkaitan dengan penyampaian informasi yang terkesan negatif. Propaganda juga dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang memberikan kemaslahatan dan positif kepada publik. Sebagai contoh, untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, perusahaan AT&T meluncurkan gerakan sosial *It Can Wait*, yang telah mengumpulkan lebih dari 40 juta komitmen tertulis dari masyarakat Amerika Serikat untuk berhenti menggunakan telepon genggam saat mengemudi (McCormack, 2024). Di Indonesia, penggunaan propaganda secara positif termanifestasi dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang mengampanyekan pentingnya aktivitas fisik harian, konsumsi sayur-buah lokal, serta pemeriksaan kesehatan berkala untuk mencegah meluasnya penyakit tidak menular.

Keterkaitan antara media massa dan propaganda menemukan bentuk jelas dalam film, karena film memiliki kemampuan unik untuk memadukan narasi, visual, dan emosi guna memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Sebagai media audiovisual, film mampu menyampaikan gagasan sekaligus menghadirkan pengalaman realitas versi tertentu sehingga penonton dapat larut dalam konstruksi makna yang dibangun (Irawanto, 2004). Kemampuan film untuk menyembunyikan propaganda di balik hiburan artistik adalah kekuatan film sebagai alat propaganda. Film mampu menghindari pertimbangan rasional penonton dan menanamkan tujuan politik langsung ke dalam struktur kognitif penonton melalui penggunaan teknik seperti montage, sudut kamera, pencahayaan, dan teori warna. Dengan kekuatan persuasinya, film mampu memengaruhi penonton secara mendalam dan menjadikannya sebagai media yang efektif dalam membentuk opini maupun sikap (Rivers et al., 2012).

Perbedaan antara film propaganda dengan film lainnya dapat dilihat secara terperinci pada aspek tujuan, metode penyajian, dan keterlibatan penonton. Film biasanya bertujuan sebagai hiburan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau sebagai suatu hasil karya seni dari sineas yang membuatnya. Sedangkan, film propaganda memiliki tujuan lainnya yakni

untuk mengubah sikap serta memobilisasi tindakan penonton demi mendukung agenda. Film propapanda juga seringkali diproduksi, didanai, atau disensor secara ketat oleh suatu otoritas seperti negara atau organisasi politik tertentu. Selain itu, beberapa film seringkali membiarkan makna yang ingin disampaikan mampu didiskusikan secara bebas berdasarkan sudut pandang masing-masing penonton sedangkan film propaganda biasanya menyajikan narasi tunggal untuk membawa penonton ke arah yang sesuai dengan pesan propaganda yang disampaikan (Funk, 2022).

Keberadaan film di Indonesia dimulai sejak era kolonial Hindia Belanda, tepatnya pada awal abad ke-20. Film pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1900 dalam bentuk gambar hidup tanpa suara. Titik awal perkembangan industri film lokal ditandai oleh produksi Loetoeng Kasaroeng di Bandung pada tahun 1926 (Tjasmadi, 2008). Memasuki era berikutnya, pertumbuhan perfilman ditandai dengan kemunculan sejumlah perusahaan produksi film serta organisasi yang berperan dalam pengembangan dan penyebaran budaya film. Pada periode 1930 hingga awal 1940-an, industri film Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Sejumlah perusahaan seperti Java Industrial Film dan Cino Motion Picture mulai aktif memproduksi film lokal. Jumlah bioskop pun mengalami peningkatan, seiring dengan maraknya peredaran puluhan judul film dalam negeri di layar lebar (Sulistianti & Evrita, 2019).

Periode 1940 hingga akhir 1945 merupakan masa kemunduran bagi perfilman Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi oleh pecahnya Perang Dunia II dan peralihan kekuasaan kolonial dari Belanda ke Jepang. Selama masa pendudukan Jepang. Perkembangan film sangat dibatasi karena adanya kontrol ketat terhadap produksi, beberapa perusahaan film bahkan dibubarkan. Pada periode tersebut, produksi film dikendalikan oleh otoritas militer Jepang dan diarahkan semata-mata untuk kepentingan propaganda, yang bertujuan menonjolkan superioritas serta legitimasi kekuasaan Jepang di wilayah koloninya (Azahra, 2023).

Setelah Indonesia merdeka, lahirlah industri film nasional pertama yang sepenuhnya digagas oleh sineas Indonesia, yakni Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) yang didirikan oleh Usmar Ismail. Pada tahun 1950, Perfini memproduksi film pertama berbahasa Indonesia berjudul *Darah dan Doa*, yang disutradarai langsung oleh Usmar Ismail. Selain Perfini, Djamaluddin Malik mendirikan Persari yang turut memperkuat industri ini. Dekade 1950 hingga tahun 1960 menjadi tahun-tahun di mana perfilman Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan (Huzelmi et al., 2022).

Periode 1960-an merupakan masa sulit bagi industri film Indonesia, yang dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tidak stabil. Hal ini diperparah dengan momentum perfilman Indonesia merosot drastis pasca peristiwa 30 September 1965. Organisasi kesenian Lekra, yang memiliki keterkaitan dengan PKI turut terseret. Setelah tragedi 1965, pengaruh dominan Lekra memudar secara drastis di mana yang sebelumnya agresif menekan perbedaan pendapat justru kehilangan kekuatan dan secara bertahap tersingkir dari arena kebudayaan nasional (Azahra, 2023).

Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek sosial, politik, dan budaya. Orde Baru, yang dimulai dengan naiknya Soeharto sebagai presiden, membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan, serta perubahan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk industri kreatif seperti industri film (Rajab, 2022). Kebijakan pemerintah Orde Baru yang terorganisir dan direncanakan, meskipun seringkali represif, sangat memengaruhi pertumbuhan industri perfilman Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengontrol industri perfilman dengan menerapkan kebijakan untuk media perfilman.

Pengaruh film membuat pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap industri perfilman melalui Departemen Penerangan yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Lembaga Sensor Film (LSF) yang melakukan seleksi dan pengendalian terhadap naskah maupun hasil akhir produksi. Pemerintahan

Orde Baru bahkan mempertahankan Ordonansi Film No. 507 Tahun 1940 warisan kolonial Belanda, yang secara tegas menyatakan bahwa tidak satu pun film dapat diputar tanpa izin dari otoritas (Kurnia, 2006). Lebih dari itu, pemerintah secara aktif memanfaatkan industri film sebagai sarana untuk memproduksi karya-karya yang sejalan dengan kepentingan politik, termasuk memperkuat wacana anti-komunisme serta mempromosikan ide pembangunan nasional (Aulia & Kurniawati, 2023).

Pemerintah saat itu menyadari potensi besar film sebagai media yang efektif dalam menyebarluaskan dan membentuk nilai kesadaran kolektif masyarakat. Dengan kesadaran tersebut, negara secara aktif memanfaatkan film untuk menanamkan nilai-nilai yang dianggap esensial bagi terciptanya stabilitas sosial-politik. Dalam praktiknya, narasi film pada periode ini diarahkan tidak hanya untuk menegaskan pentingnya ketertiban dan disiplin sosial, tetapi juga untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama Orde Baru. Film-film yang diproduksi menonjolkan tema kemajuan ekonomi dan modernisasi terkait program pembangunan negara. Strategi ini sekaligus memperkuat dominasi negara atas masyarakat dan membangun citra ideal Orde Baru sebagai pelindung sekaligus motor utama pembangunan. Dengan demikian, film tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana budaya yang efektif dalam menopang hegemoni politik dan proyek pembangunan nasional rezim (Sasono et al., 2011).

Pembangunan nasional didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, terutama setelah pemerintah berhasil mengatasi krisis ekonomi dan politik warisan Orde Lama. Secara konstitusional, pembangunan ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sementara landasan operasionalnya dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN berfungsi vital sebagai pola umum pembangunan jangka panjang serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (PELITA), sekaligus menjadi instrumen untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintah. Dalam konteks ini, film

difungsikan secara strategis sebagai alat penerangan dan pendidikan untuk menyalurkan pesan-pesan pembangunan dari pusat ke daerah, memastikan bahwa visi negara tentang "masyarakat adil dan makmur" dapat dipahami dan didukung oleh rakyat secara luas (Putra, 2019).

Beberapa contoh penggunaan film sebagai alat propaganda pada masa Orde Baru terkait dengan pembangunan nasional adalah film Dr. Siti Pertiwi Kembali ke Desa (1979) yang menceritakan tentang program pembangunan di sektor kesehatan pedesaan di mana tenaga medis dari perkotaan dikirim ke desa untuk memberikan layanan kesehatan. Selain itu, cerita film ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan melalui peran relawan yang bekerja untuk melakukan perubahan sosial di wilayah pelosok. Kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu aspek yang berupaya dibangun oleh Orde Baru selain agama, pemukiman, dan budaya dengan tujuan mencapai perkembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan masyarakat Indonesia seutuhnya (Departemen Penerangan RI, 1992).

Film-film lain yang diproduksi pada masa tersebut, seperti Desa di Kaki Bukit (1972) karya Asrul Sani serta Joe Pergi ke Desa (1989) karya Chaerul Umam. Kedua film ini mengangkat tema mengenai pembangunan pedesaan dan program transmigrasi, sehingga selaras dengan orientasi kebijakan pembangunan yang dicanangkan negara pada periode tersebut. Pesan pembangunan yang ditampilkan dalam film tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) serta program Transmigrasi (Heeren, 2019).

Melalui bahasan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam bagaimana film dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengkonstruksi dan mempertahankan citra Orde Baru sebagai penguasa. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana film dimanfaatkan sebagai media untuk membentuk citra Orde Baru melalui analisis naratif terhadap film-film yang diproduksi atau didukung oleh negara yang terkait dengan pembangunan nasional. Dengan mengkaji bagaimana narasi dan citra dibangun dalam film,

penelitian ini bertujuan untuk membongkar mekanisme ideologis yang bekerja di baliknya dan memahami bagaimana kekuasaan dapat dikonstruksi dan dilanggengkan melalui media budaya populer.

Sebagai referensi relevan, penulis merujuk skripsi Yudo Sedio Utomo berjudul “Kebijakan Perfilman Indonesia Pada Masa Orde Baru (1967–1980)”, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2018 yang mengkaji kebijakan pemerintah terhadap industri film pada awal Orde Baru. Meski sama-sama membahas perfilman era tersebut, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menelaah kebijakan, tetapi juga menyoroti bagaimana rezim memanfaatkan film untuk membangun narasi yang sejalan dengan kepentingan politik Orde Baru. Penelitian lain yang dirujuk adalah skripsi Nur Alifa Taruna Sari berjudul “Sinematografi Indonesia: Unsur-Unsur Pornografi Pada Sinema Indonesia Tahun 1980–1998”, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Kajian tersebut menitikberatkan pada maraknya unsur pornografi dan kebijakan sensor. Adapun penelitian penulis berbeda karena memfokuskan film sebagai media propaganda politik, bukan pada isu moralitas. Penelitian relevan berikutnya adalah karya Fachri Ghazali berjudul “Film Sebagai Media Kritik Sosial Terhadap Pemerintah Orde Baru Tahun 1970–1981”, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 yang membahas film sebagai sarana kritik sosial. Persamaannya terletak pada analisis fungsi film dalam relasi negara–masyarakat, namun penelitian penulis berfokus pada film sebagai alat propaganda pemerintah, bukan sebagai medium kritik.

Terdapat pula beberapa kajian relevan yang menjadi dasar perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan seperti buku *Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer Dalam Sinema Indonesia* karya Budi Irawanto (1999) dan *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Seni dan Sastra* karya Wijaya Herlambang (2014). Kajian-kajian sebelumnya umumnya menitikberatkan perhatian pada film-film yang mereproduksi narasi anti-komunisme serta militerisme, terutama yang berhubungan dengan legitimasi

politik Orde Baru melalui pembentukan musuh ideologis dan glorifikasi peran angkatan bersenjata. Sementara itu, penelitian yang akan penulis kerjakan mengalihkan perhatian pada ranah yang berbeda, yakni pada film dan tayangan yang secara langsung mengusung narasi pembangunan nasional. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana film merefleksikan proyek pembangunan Orde Baru, tetapi juga bagaimana media tersebut digunakan untuk menanamkan nilai-nilai modernisasi, keteraturan sosial, dan citra negara yang sedang bertumbuh.

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dalam melakukan penelitian sejarah sehingga bahasan kajian tetap sejalan dengan pokok bahasan utama dan permasalahan yang ingin dipecahkan tidak jauh melebar. Pembatasan masalah juga dilakukan dalam upaya memudahkan peneliti dalam melakukan tahapan historiografi.

Penelitian yang berjudul “Propaganda Dalam Tayangan Layar Orde Baru: Meneguhkan Citra Pembangunan Nasional di Masyarakat (1969-1994)” ini akan berfokus pada analisis film sebagai media digunakan oleh pemerintah Orde Baru sebagai sarana propaganda untuk membangun dan mempertahankan legitimasi kekuasaan serta mendukung visi Orde Baru. Penggunaan istilah “Tayangan Layar” pada judul penulisan skripsi ini mengacu pada sarana penayangan film seperti bioskop, televisi, maupun layar tancap. Kajian akan menekankan pada narasi-narasi dominan yang dikonstruksikan terkait wacana pembangunan nasional. Penelitian ini dibatasi secara temporal pada periode 1969-1994, yaitu masa ketika pemerintah Orde Baru menjalankan program pembangunan nasional melalui Pelita I hingga Pelita V dan secara aktif memanfaatkan film sebagai alat penyuluhan serta propaganda pembangunan. Di awal tahun 1990-an juga menjadi tahun-tahun perfilman Indonesia memasuki periode mati suri di mana perfilman Indonesia mulai pasif.

2. Perumusan Masalah

Setelah memaparkan dasar pemikiran, penulis mengajukan pertanyaan untuk menentukan fokus penelitian, yakni:

1. Bagaimana pemerintah Orde Baru mengontrol perfilman nasional?
2. Bagaimana konstruksi narasi pembangunan nasional pada masa Orde Baru disampaikan melalui film?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian yang berjudul “Propaganda Dalam Tayangan Layar Orde Baru: Meneguhkan Citra Pembangunan Nasional di Masyarakat (1969-1994)” ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pemerintah Orde Baru memanfaatkan media film sebagai sarana politik untuk membawa stabilitas politik dan arah yang sesuai dengan visi Orde Baru terkait pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi narasi-narasi politik yang terkait dengan pembangunan nasional yang dikonstruksikan melalui film.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah tulisan sejarah sosial dan sejarah politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi media dan kajian film di Indonesia dengan menunjukkan relasi antara kekuasaan dan produksi budaya. Analisis ini juga diharapkan mampu menambah wawasan mengenai strategi legitimasi sebuah rezim melalui media budaya populer.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman

kritis masyarakat mengenai bagaimana media, khususnya film, dapat digunakan sebagai alat politik dan propaganda. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan membuka ruang bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji berbagai topik yang berkaitan dengan sejarah media, politik, dan kebudayaan pada masa Orde Baru dari berbagai perspektif lain.

D. METODE DAN BAHAN SUMBER

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sejarah, peneliti perlu memahami peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian menjadi bagian penting bagi peneliti untuk memudahkan dalam menulis penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “*Propaganda Dalam Tayangan Layar Orde Baru: Meneguhkan Citra Pembangunan Nasional di Masyarakat (1969-1994)*”, peneliti akan memaparkan tahapan dalam melakukan pencarian dan pengolahan data penelitian yang didapatkan

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah metode historis di mana dalam memahami berbagai peristiwa masa lalu sebagai suatu fakta sejarah diperlukan berbagai tahapan serta proses agar mampu direkonstruksi secara utuh (Sari, 2015). Dalam metode sejarah sendiri memiliki beberapa tahapan kerangka ilmiah (Sjamsuddin, 2007), yakni:

1. Heuristik, yakni tahapan untuk mencari dan menemukan sumber penelitian yang dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, pengamatan lapangan, maupun wawancara. Pada tahapan ini seorang peneliti berupaya untuk sumber-sumber dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai macam data, materi, atau evidensi sejarah. Tahapan ini merupakan tahapan yang memerlukan waktu sebab seorang peneliti perlu mencari berbagai data yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Penulis melakukan tahapan ini dengan melakukan beberapa studi kepustakaan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penulis juga

melakukan pencarian sumber ke toko buku serta menelusuri internet. Terkait sumber primer, penulis menemukan film-film melalui pencarian di Perpustakaan nasional lantai 8 dengan kategori rekaman video dan mikrofilm. Penulis menemukan film-film seperti *Dr. Siti Pertiwi Kembali ke Desa* (1979), *Titian Serambut Dibelah Tujuh* (1982), dan *Joe Pergi ke Desa* (1989). Penulis juga menemukan sumber primer melalui situs Youtube pada channel Rumah Film Indonesia yakni film yang berjudul *Bing Slamet Sibuk* (1973). Untuk pencarian sumber sekunder, penulis mencari sumber-sumber yang terkait dengan topik perfilman, propaganda, dan pembangunan nasional berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya.

2. Kritik Sumber, adalah tahapan evaluasi atau kritik terhadap setiap sumber yang telah ditemukan dan akan digunakan. Kritik sumber memiliki tujuan agar seorang peneliti tidak langsung menerima apa yang tercantum dalam sumber tetapi juga menyaringnya dengan kritis agar dapat mengambil fakta yang ada didalamnya. Tahapan ini terdiri atas dua hal yakni kritik eksternal dan kritik internal.
 - a) Kritik Eksternal adalah proses pengujian mengenai keaslian sumber sehingga dilakukan seleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Kritik eksternal memastikan atau menguji aspek-aspek luaran yang ada pada suatu sumber sejarah. Pada tahapan ini penulis memastikan sumber-sumber yang akan dijadikan referensi dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Pada sumber-sumber fisik, penulis memeriksa bahan sumber dan mengecek pada bagian hak cipta, memastikan keaslian, tahun terbit, dan identitas penerbit. Pada sumber-sumber digital, penulis menambahkan pemeriksaan dengan mengecek kredibilitas situs yang mencantumkan sumber.
 - b) Kritik Internal adalah proses pengujian mengenai keabsahan isi dari sumber sejarah yang telah diperoleh apakah bisa dipercaya atau tidak. Pada tahapan ini penulis memastikan bahwa sumber-sumber yang akan

digunakan memiliki validitas serta informasi yang terdapat di dalamnya terhindar dari bias dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat pada sumber dengan literatur pendukung dan penelitian terdahulu untuk melihat kesesuaian fakta yang ada pada sumber.

3. Interpretasi, merupakan penafsiran fakta-fakta yang muncul melalui data-data yang terseleksi atau realita yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mencari kebenaran yang kemudian disesuaikan dengan topik yang diteliti. Interpretasi seringkali disebut sebagai analisis sejarah. Pada tahapan ini, penulis membaca dan memahami informasi yang telah diverifikasi keabsahannya. Terhadap sumber-sumber primer yakni film, penulis melakukan analisis untuk mencari tahu apakah film-film yang di analisis dapat dikategorikan sebagai film pembangunan nasional dan menganalisis wacana pembangunan nasional yang diperlihatkan dalam film-film tersebut. Penulis juga melakukan analisis baik pada sumber primer maupun sumber sekunder mengenai bagaimana Orde Baru mengontrol perfilman nasional dan membentuk narasi pembangunan nasional melalui film yang nantinya akan menjadi isi pembahasan pada penulisan skripsi.
4. Historiografi, merupakan tahapan akhir dalam rangkaian tahapan metode sejarah serta untuk menetapkan tujuan dalam melakukan suatu penelitian. Historiografi atau penulisan sejarah dilakukan dengan menyusun secara kronologis suatu peristiwa sejarah yang disusun berdasarkan aturan kausalitas. Penulisan yang dilakukan menjelaskan secara runtut perkembangan perfilman mulai dari masa kolonial hingga Orde Baru, bagaimana Orde Baru mengontrol perfilman dan memanfaatkan film sebagai media propaganda program pembangunan nasional berdasarkan sumber-sumber yang sebelumnya telah dianalisis.

2. Bahan Sumber

Sumber penelitian diperoleh melalui film-film yang di dalamnya memiliki agenda pembangunan nasional yakni *Bing Slamet Sibuk* (1973), *Dr. Siti Pertiwi Kembali ke Desa* (1979), *Titian Serambut Dibelah Tujuh* (1982), dan *Joe Turun ke Desa* (1989). Penulis juga menambahkan referensi dari Departemen Penerangan Republik Indonesia terkait dengan proyek-proyek pembangunan nasional, program pembinaan perfilman nasional tahun ke-IV (1977/1978) dan ke-V (1978/1979), serta Festival Film Indonesia (FFI). Sumber-sumber penelitian lainnya diperoleh melalui buku-buku yang membahas mengenai propaganda, film, serta dinamika perfilman nasional di Indonesia terutama pada masa Orde Baru seperti buku *Sinema Indonesia Pasca Orde Baru: Jiwa Reformasi dan Hantu Masa Lalu* karya Quirine Van Heeren, *Indonesian Cinema: Framing The New World Order* karya Krishna Sen, serta *Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer Dalam Sinema Indonesia* karya Budi Irawanto. Penulis juga melengkapi data dengan referensi artikel dan buku-buku lainnya untuk mendukung pembahasan narasi pembangunan nasional yang disampaikan lewat media film.